



Analisis Korespondensi Pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

Bela Gustinar¹, Ega Saherti*, Natania Rosalinda A.S *, Katiana Selma*, Rega Aghnia
Tazkiyatun N*, Stephanie Ellora*, Syela Norika S*, Resa Septiani Pontoh*
Universitas Padjadjaran¹,*
bela18001@mail.unpad.ac.id

Abstract

Abstrak. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Provinsi Jawa Barat masih terus mengalami kenaikan kemiskinan, pada tahun 2020 Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan persentase penduduk miskin dimana pada bulan Maret sebesar 7.88% menjadi 8.43% pada bulan September. Salah satu upaya menurunkan jumlah penduduk miskin di Jawa Barat adalah melalui kebijakan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Kebijakan sosial yang dirumuskan perlu diarahkan untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan nasional yang didukung dengan pelaksanaan program afirmatif dan langsung tepat sasaran kepada penduduk miskin dan kelompok rentan, yaitu salah satunya kelompok PMKS. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan Kabupaten/Kota di Jawa Barat berdasarkan PMKS dengan menggunakan analisis korespondensi. Data yang digunakan adalah data PMKS di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat pada tahun 2020. Dari hasil penelitian didapatkan proporsi kumulatif inersia sebesar 0.8913895, dapat di artikan bahwa peta persepsi yang terbentuk dapat menggambarkan informasi data sebenarnya sebesar 89% maka dikatakan cukup baik.

Kata kunci: PMKS, Analisis Korespondensi, Pemetaan

I. PENDAHULUAN

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia dan masih terus mengalami kenaikan angka kemiskinan. Hal ini dibuktikan dari tabel 1.1 dimana jumlah penduduk miskin serta persentase penduduk miskin mengalami peningkatan dari periode September 2019 hingga September 2020. Oleh sebab itu, untuk menurunkan jumlah penduduk miskin perlu dilakukan suatu upaya oleh pemerintah yang salah satunya adalah melalui kebijakan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

Table 1.1 Kemiskinan di Jawa Barat

Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)			Persentase Penduduk Miskin		
	2019	2020		2019	2020	
	September	Maret	September	September	Maret	September
Jawa Barat	3375,89	3920,23	4188,52	6,82	7,88	8,43

Sumber : BPS Jawa Barat, 2021

Kebijakan sosial yang akan dibuat perlu diarahkan untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan nasional yang didukung dengan pelaksanaan program afirmatif serta tepat sasaran kepada penduduk miskin dan kelompok rentan, yaitu salah satunya kelompok PMKS (Syafar, 2018).

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan





gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan.

Masalah PMKS di provinsi Jawa Barat masih menjadi PR bagi Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Barat (Nizar, 2021). Hal ini sejalan dengan upaya Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Barat dalam melakukan program unggulannya yaitu UKS dalam memberikan pelayanan sosial terpadu satu atap “one stop service”, mengedepankan integrasi dan keterpaduan serta dilengkapi dengan sistem aplikasi data dan informasi berbasis “smart system”. Diharapkan penanganan permasalahan sosial akan dapat diselesaikan secara profesional sehingga tepat sasaran.

Fakta menunjukkan bahwa Jawa Barat masih perlu mengupayakan untuk menanggulangi adanya PMKS. Oleh sebab itu, pada penelitian ini akan dilakukan pengelompokan daerah di Jawa Barat berdasarkan indikator Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk memperoleh gambaran sehingga dapat mengambil kebijakan dalam menentukan sasaran untuk intervensi penyandang kesejahteraan sosial. Pengelompokan tersebut dilakukan dengan cara peta persepsi menggunakan analisis korespondensi. Peta persepsi tersebut dapat digunakan untuk memperoleh informasi berupa permasalahan PMKS apa yang perlu diperhatikan dengan serius pada masing-masing kota/kabupaten di Jawa Barat.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, Jawa Barat yang memiliki jumlah penduduk miskin yang terus meningkat memerlukan sebuah kebijakan sosial dalam menangani kesejahteraan masyarakatnya, kebijakan sosial tersebut haruslah tepat sasaran salah satunya penanggulangan terhadap keberadaan PMKS di Jawa Barat itu sendiri.

Maksud dalam penelitian ini adalah melakukan pemetaan terhadap kabupaten/kota di Jawa Barat berdasarkan indikator PMKS. Sementara tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan peta persepsi dari analisis korespondensi untuk dapat mengelompokkan kabupaten/kota di Jawa Barat berdasarkan PMKS.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai gambaran dalam mengambil kebijakan dalam menentukan sasaran untuk intervensi penyandang kesejahteraan sosial. Dimana Peta persepsi yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan gambaran untuk memperoleh informasi berupa permasalahan PMKS apa yang perlu diperhatikan dengan serius pada masing-masing kota/kabupaten di Jawa Barat.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dari Dinas Sosial Provinsi Jawa barat yang diakses melalui Open Data Jawa Barat yaitu data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dari 18 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.

Table 2.1

Variable	Keterangan
X1	Anak balita terlantar
X2	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan
X3	Anak jalanan
X4	Anak berhadapan dengan hukum

2.1 Analisis Korespondensi

Analisis korespondensi merupakan salah satu analisis multivariate yang menggambarkan informasi dalam sebuah table kontingensi yang memuat frekuensi item dari variable kategori ke dalam grafik, dimana grafik yang di hasilkan dapat mengklasifikasikan hubungan interaksi antara variable pada baris dan variable pada kolom secara bersamaan (Rencher & Christensen, 2012).





2.2 Independensi

Uji Chi-Square digunakan untuk analisis independensi untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variable baris (dalam hal ini kabupaten/kota) dan variable kolom (dalam hal ini PMKS) dalam analisis korespondensi.

$H_0: \pi_{ij} = \pi_i \pi_j$ (Tidak ada hubungan antara baris dengan kolom)

$H_1: \pi_{ij} \neq \pi_i \pi_j$ (Terdapat hubungan antara baris dengan kolom)

Statistik Uji :

$$\chi^2 = \sum \frac{(n_{ij} - \hat{\mu}_{ij})^2}{\hat{\mu}_{ij}} \quad (1)$$

dimana :

$$\hat{\mu}_{ij} = \frac{n_i \times n_j}{n}$$

n_i = jumlah baris ke-i

n_j = jumlah kolom ke-j

n = jumlah keseluruhan

n_{ij} = data pada baris ke-i kolom ke-j

2.3 Langkah-langkah Analisis Korespondensi

Berikut merupakan langkah dalam melakukan Analisis Korespondensi antar wilayah dan banyaknya penduduk yang tergolong PMKS dengan tahap sebagai berikut:

- Membentuk tabel profil baris dan tabel profil kolom berdasarkan tabel kontingensi sebelumnya.
- Menghitung nilai proporsi inersia baris dan kolom berdasarkan profil baris dan profil kolom.
- Menghitung nilai singular value decomposition berdasarkan inersia baris dan inersia kolom untuk menampilkan titik koordinat masing-masing variabel wilayah dan variabel usaha kedalam plot dua dimensi.
- Membuat kesimpulan dengan merangkum hasil analisis sehingga memberikan informasi mengenai penduduk yang tergolong PMKS pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Statistika Deskriptif

Berikut ini statistic deskriptif dari data PMKS Jawa Barat tahun 2020:

- Variabel X1 (Anak Balita Terlantar)
Dari hasil analisis menggunakan RStudio, 25% dari data penelitian adalah anak balita terlantar dengan jumlah di bawah 29 orang dan 75% anak balita terlantar dengan jumlah di bawah 383 orang dengan nilai tengah sebesar 84. Selain itu, nilai minimum pada variabel X1 yaitu 0 (tidak ada balita terlantar) dan nilai maksimum atau jumlah balita terlantar terbanyak adalah sebesar 3817 orang yaitu dari Kabupaten Indramayu. Rata – rata jumlah anak balita terlantar di Provinsi Jawa Barat adalah 434,1 atau 432 orang pada setiap wilayah.
- Variabel X2 (Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan)
Hasil analisis dari *software* RStudio menunjukkan bahwa 25% dari data penelitian adalah anak yang menjadi korban tindak kekerasan dengan jumlah di bawah 38 orang dan 75% anak yang menjadi korban kekerasan dengan jumlah di bawah 84 orang dengan nilai tengah sebesar 52 orang. Selain itu, nilai minimum pada variabel X2 yaitu 0 (tidak ada anak yang





menjadi korban kekerasan) dan nilai maksimum atau jumlah anak yang menjadi korban kekerasan terbanyak adalah sebesar 665 orang yaitu dari Kabupaten Karawang. Rata – rata jumlah anak yang menjadi korban tindak kekerasan di Provinsi Jawa Barat adalah 133,1 atau 134 orang pada setiap wilayah.

- Variabel X3 (Anak Jalanan)
Diketahui bahwa hasil analisis menunjukkan 25% dari data penelitian adalah anak jalanan dengan jumlah di bawah 33 orang dan 75% anak jalanan dengan jumlah di bawah 237 orang dengan nilai tengah sebesar 72 orang. Selain itu, nilai minimum pada variabel X3 atau jumlah anak jalanan terkecil yaitu 3 orang dari Kota Banjar dan nilai maksimum atau jumlah anak jalanan terbanyak adalah sebesar 6290 orang yaitu dari Kabupaten Bekasi. Rata – rata jumlah anak jalanan di Provinsi Jawa Barat adalah 429,6 atau 430 orang pada setiap wilayah.
- Variabel X4 (Anak Berhadapan dengan Hukum)
Pada variabel X4, diketahui bahwa hasil analisis menunjukkan 25% dari data penelitian adalah anak berhadapan dengan hukum dengan jumlah di bawah 4 orang dan 75% anak berhadapan dengan hukum dengan jumlah di bawah 44 orang dengan nilai tengah sebesar 21 orang. Selain itu, nilai minimum pada variabel X4 yaitu 0 (tidak ada anak yang berhadapan dengan hukum) dan nilai maksimum atau jumlah anak yang berhadapan dengan hukum terbanyak adalah sebesar 365 orang yaitu dari Kabupaten Indramayu. Rata – rata jumlah anak berhadapan dengan hukum di Provinsi Jawa Barat adalah 38,37 atau 39 orang pada setiap wilayah.

3.2 Independensi

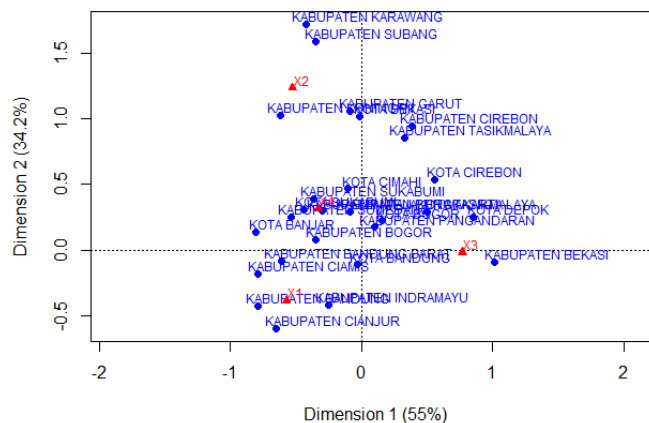
Uji Independensi dengan menggunakan Chi-Square diperoleh nilai $\chi^2 = 21478.14$ dan $p - value = 2.2 \times 10^{-16}$ sehingga dengan taraf signifikansi 5% di dapatkan bahwa H_0 ditolak yang berarti Kabupaten dan Kota di Jawa Barat dengan PMKS di Jawa Barat dependen, atau terdapat hubungan.

3.3 Analisis Korespondensi

Tabel 3.1 Proporsi Kumulatif Inersia

Dimensi	Proporsi Kumulatif
1	0.5498532
2	0.8913895
3	1.0000000

Dari table diatas didapat nilai cumulative proportion pada dua dimensi sebesar 0.8913895 dimana hal tersebut menunjukan bahwa apabila dipetakan dalam dua dimensi, keragaman data atau karakteristik data yang mampu dijelaskan sebesar 89.13895% dari kergaman data seluruhnya.



Gambar 1 : Plot Pemetaan Pada Objek





Gambar 1 merupakan plot antara variabel dan objek dimana dari plot tersebut dapat diketahui variabel apa saja yang melekat pada objek yang diamati. Dari hasil pada Gambar 1. dapat dilihat bahwa, pada kuadran I (7 daerah) dan Kuadran IV (1 daerah) yaitu Kabupaten Cirebon, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Cirebon, Kota Bogor, Kabupaten Pangandaran, Kota Depok, Kabupaten Bekasi dan Tasikmalaya dengan variabel yang melekat variabel anak (X3) artinya 8 daerah tersebut lebih identik dengan masalah Anak jalanan. Pada kuadran II (13 daerah) yaitu meliputi Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Kuningan, kabupaten Garut, Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bnajar, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kota Cimahi, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Purwakarta dengan variabel yang melekat variabel anak yang menjadi korban tindak kekerasan (X2) dan anak berhadapan dengan hukum (X4) artinya 13 daerah tersebut lebih identik dengan anak yang menjadi korban tindak kekerasan dan anak berhadapan dengan hukum. Sedangkan pada kuadran III terdapat 6 daerah yaitu Kabupaten Cianjur, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung dan Kabupaten Ciamis dengan variabel yang melekat variabel anak balita terlantar (X1) artinya 6 daerah tersebut lebih identik dengan masalah anak balita terlantar.

IV. KESIMPULAN

Dengan menggunakan analisis korespondensi dapat diambil suatu kesimpulan tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di 27 Kabupaten/Kota di Jawa barat yaitu :

1. Terdapat kemiripan diantara 4 variabel PMKS yaitu anak yang menjadi korban tindak kekerasan dan anak yang berhadapan dengan kasus hukum.
2. Masalah kesejahteraan sosial yang paling dominan di Jawa Barat yaitu anak yang menjadi korban tindak kekerasan dan anak berhadapan dengan hukum dengan melibatkan peta penyebaran pada 13 Kabupaten/Kota di Jawa barat yaitu Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Kuningan, kabupaten Garut, Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bnajar, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kota Cimahi, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Purwakarta.





DAFTAR PUSTAKA

Pada daftar pustaka tuliskan seluruh nama penulis, kecuali penulis lebih dari 6 orang, bisa gunakan dkk.

- [1] G. Eason, B. Noble, and I. N. Sneddon, "On certain integrals of Lipschitz-Hankel type involving products of Bessel functions," *Phil. Trans. Roy. Soc. London*, vol. A247, pp. 529–551, April 1955. (references)
- [2] J. Clerk Maxwell, *A Treatise on Electricity and Magnetism*, 3rd ed., vol. 2. Oxford: Clarendon, 1892, pp.68–73.
- [3] I. S. Jacobs and C. P. Bean, "Fine particles, thin films and exchange anisotropy," in *Magnetism*, vol. III, G. T. Rado and H. Suhl, Eds. New York: Academic, 1963, pp. 271–350.
- [4] K. Elissa, "Title of paper if known," unpublished.
- [5] R. Nicole, "Title of paper with only first word capitalized," *J. Name Stand. Abbrev.*, in press.
- [6] Y. Yorozu, M. Hirano, K. Oka, and Y. Tagawa, "Electron spectroscopy studies on magneto-optical media and plastic substrate interface," *IEEE Transl. J. Magn. Japan*, vol. 2, pp. 740–741, August 1987 [Digests 9th Annual Conf. Magnetism Japan, p. 301, 1982].
- [7] M. Young, *The Technical Writer's Handbook*. Mill Valley, CA: University Science, 1989.

